

REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP KANDIDAT CALON WALIKOTA TERNATE PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA TERNATE

Stefangli Lette^{1,*}, Rivo Sumampouw², Efvendi Sondakh³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Corresponding author:

stefanglilette084@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Rekrutmen politik menjadi salah satu penentu bagi kemenangan parpol dalam sebuah kontestasi politik. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh sebuah parpol dalam menentukan siapa calon yang akan diusungnya. Artikel ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Ternate. Saat itu PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan dalam Pilkada tersebut. Karena selama ini yang terjadi di Kota Ternate belum pernah ada parpol yang mengusung kandidat perempuan dalam kontestasi pilkada. Temuan penelitian menggambarkan bahwa PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan saat itu karena, kandidat merupakan kader terbaik dari partai dan mengikuti kaderisasi partai dari tingkat yang paling rendah, menjadi ketua DPC PDIP Kota Ternate, hingga menjadi anggota DPRD Kota Ternate. Rekam jejak tersebut menjadi dasar pertimbangan utama PDIP Kota Ternate hingga mengusung kandidat perempuan pada Pilkada tahun 2020 di Kota Ternate.

Kata Kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

Political recruitment is a very important function for political parties. Political recruitment is one of the determinants for the victory of political parties in a political contestation. There are many considerations that must be made by a political party in determining who its candidate will be. This article will examine the factors that influence the considerations of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Ternate City. At that time the PDIP of Ternate City carried a female candidate in the Pilkada. Because so far what has happened in Ternate City has never had a political party that carries a female candidate in the election contestation. The research findings illustrate that the PDIP of Ternate City carried female candidates at that time because the candidate was the best cadre of the party and followed the party's regeneration from the lowest level, became the chairman of the DPC PDIP of Ternate City, to become a member of the Ternate City DPRD. This track record became the main consideration for the Ternate City PDIP to carry female candidates in the 2020 Regional Head Elections in Ternate City.

Keywords: Recruitment; PDIP; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Miriam Budiardjo, (2008:403-404) mengemukakan Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Selain itu, partai politik juga mempunyai tujuan yaitu, untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kedudukan politik, serta mempertahankannya. Untuk mencapai tujuan maka partai politik harus memiliki anggota yang banyak dan mempunyai kemampuan yang baik secara intelektual agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Untuk memiliki anggota dengan kemampuan yang berkualitas, maka partai politik harus menjalankan salah satu fungsinya yaitu sebagai saran rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah merekrut kader-kader yang berkualitas, karena dengan kader yang berkualitas maka partai politik dapat mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo M, 2008:408).

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik, (dalam bukunya Sigit Pamungkas 2012) tentang Partai Politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik (dalam Pamungkas, 2012:90). Hal yang sama dikatakan Ramla Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik, beliau mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Rauf, 2016). Dengan adanya rekrutmen maka ini juga merupakan suatu peluang bagi partai politik untuk dapat memperluas kekuasaannya pada setiap daerah-daerah dengan mengutus salah satu delegasi partai yang telah direkrut di setiap daerah-daerah tersebut itu sendiri, untuk ikut bertarung dalam pemilu. Dalam rekrutmen politik ada yang namanya proses rekrutmen politik yang dimana para kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial.

Menurut Norris, terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu, dalam Pamungkas (2012:93). Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksian ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Tiga tahapan ini yang merupakan tahap yang biasanya ditemui dalam perekrutan, karena tahap ini juga biasa dipakai oleh organisasi non-partai politik. Adapun selain tiga tahap yang dikemukakan oleh Norris, partai politik juga memiliki tahap tersendiri dalam merekrut seorang kader partai dan semua partai politik mempunyai tahap rekrutmen yang berbeda-beda, hal ini dilakukan agar partai politik mendapat figur yang potensial.

Fungsi rekrutmen politik ini paling nampak kita lihat dilakukan pada saat mendekati momentum pilkada dimana partai melakukan perekrutan kader yang berkualitas, hal ini dilakukan agar figur yang direkrut dapat ikut berkompetisi dalam Pilkada, seperti yang dilakukan oleh berbagai partai politik yang ada di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada PILKADA 2020.

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang penduduknya perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki, maka dari itu sangat penting hak-hak sebagai kaum perempuan diperjuangkan dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam politik mestinya diperhatikan sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi maupun regulasi artinya 30% menjadi pijakan perempuan, tetapi momentum demokrasi di kota Ternate masih sangat dipengaruhi oleh politik identitas, maksudnya masyarakat kota Ternate berpandangan bahwa politik itu bukan bidang kaum perempuan sehingga menurut mereka perempuan tidak layak duduk dalam jabatan tinggi dalam hal ini walikota Ternate, sehingga kalau dilihat secara historis pilkada di Ternate, kaum laki-laki paling dominan yang diusung oleh partai-partai politik untuk menjadi calon walikota, sedangkan kaum perempuan sepanjang konstalasi pilkada di Ternate tidak pernah ada kaum perempuan yang menjadi calon walikota. Hal ini menjadi fenomena penting dalam proses rekrutmen figur.

Masalah lain yang dijumpai peneliti di lapangan pada saat pra penelitian bahwa PDIP Maluku Utara dalam merekrut figur calon walikota pada pilkada kota Ternate tidak melihat fenomena yang ada seperti yang dijelaskan peneliti sebelumnya diatas, sehingga pada pilkada 2020 PDIP merekrut perempuan yakni Merlisa Marsaoly sebagai calon walikota Ternate. Alasan PDIP merekrut Merlisa Marsaoly yakni PDIP mau mendobrak kearifan lokal yang ada di Ternate serta PDIP ingin meyakinkan masyarakat kota Ternate bahwa politik bukan hanya bidang dari kaum laki-laki tetapi, politik juga bidangnya kaum perempuan, artinya bahwa perempuan juga bisa turut ambil bagian dalam bidang politik.

Traek Record dan kemampuan dari figur Merlisa Marsaoly yaitu, awalnya Merlisa Marsaoly memulai karir politiknya sebagai sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) Ternate Utara pada tahun 2005 dan 2007, kemudian pada tahun 2009 tepatnya pada pemilihan legislatif, Merlisa maju bertarung merebut kursi legislatif Kota Ternate dan hasilnya terpilih sebagai anggota DPRD periode 2009 sampai 2014. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2010, Merlisa pun dipilih secara aklamasi menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Ternate. Selanjutnya pada tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Ternate, dan sekaligus membawa PDIP menjadi pemenang pada pileg Kota Ternate. Keberhasilan tersebut mengantarkan Merlisa menjadi ketua DPRD Kota Ternate periode 2014-2019. Karir politiknya terus berlanjut, pada pileg 2019 ia terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Ternate yang ketiga kali. Dan pada tahun 2019 juga Konferensi Cabang ke V DPC PDIP Kota Ternate, Merlisa kembali lagi terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPC PDIP Kota Ternate untuk periode 2019-2024. Jadi traek record dan kemampuan figur Merlisa Marsaoly sudah terukur dan teruji.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Ternate menarik untuk dianalisis dengan munculnya kandidat walikota yang direkrut oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hal tersebut terlihat mengubah wajah demokrasi di Kota Ternate.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik merupakan wadah untuk menampung dan merekrut orang-orang atau kader yang benar-benar memiliki kualitas, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin di tinggal oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Pengorganisasian masyarakat di luar partai tidak menjalankan fungsi rekrutmen politik, karenanya fungsi ini sekaligus menunjukan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti (2010), Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Menurut Firmanzah (2007), Rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah atau di gantikan agar berorientasi pada masalah bangsa dan negara karena dalam bangsa dan negara selalu ada masalah – masalah atau patologi birokrasi.

Rush dan Althof (2003), dalam pandangannya rekrutmen politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Lebih

lanjut, Rush dan Althof mengatakan bahwa rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Dikatakan proses dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapat kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan itu disebut formal kalau para individu direkrut dengan terbuka melalui cara procedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan. Kemudian disebut informal manakala para individunya direkrut secara pribadi (sendirian) atau dibawah tangan tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.

Selain itu rekrutmen politik juga dipandang sebagai proses yang dimana setiap individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik secara aktif (Czudnowski, dalam Greenstein dan Polsby).(1) Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat (kandidasi), dan rekrutmen legislatif dan eksekutif (Czudnowski dan Ishiyama); tetapi ada yang berusaha menarik garis batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda (Norris, Hazan, dan Camt); dan ada pula yang menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.(2) Bagi yang membedakan, rekrutmen politik didefinisikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial, sementara itu rekrutmen legislatif itu bicara tentang bagaimana kandidat yang dinominasikan partai terpilih menjadi pejabat public (Pamungkas, 2012:92)

• **Proses Rekrutmen**

Proses rekrutmen politik merupakan proses atau tahap-tahap untuk menentukan kandidat agar dapat menjadi anggota dari suatu partai politik. Ada beberapa tahap yang dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat dari partainya untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Setiap partai politik memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda tergantung dengan yang diatur dalam konstitusi partai tersebut. Akan tetapi menurut Norris, ia mengatakan terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yakni:

1. Tahap Sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal.
2. Tahap Penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.
3. Tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Selain teori yang dikemukakan Norris ada juga teori yang digunakan peneliti untuk penelitian yaitu, menurut Syamsyudin Haris (2005), yang menyatakan bahwa rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahap mencakup interaksi antara elit partai di tingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijarah. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Norris mengemukakan bahwa sebenarnya masing-masing dari tahap dapat dicermati sebagai suatu permainan yang progresif dari ayunan tangga nada music, banyak yang dapat memenuhi kriteria dan sedikit didominasi dengan kurang yang sukses (Pamungkas, 2012:93). Model parpol pada keseluruhan tahapan dari rekrutmen politik sangatlah berkaitan dengan partai politik untuk mengintropeksi diri. Ada banyak hal urgen yang boleh menunjukkan eksistensi partai politik dalam rekrutmen politik ialah siapa figur yang dinominasikan dan siapa saja yang berhak menyeleksi dimana kandidat yang diseleksi dan bagaimana kandidat diputuskan.

Hal tersebut terhadap perlakuan maka akan menciptakan modal untuk pengelolaan partai antara pola eksklusif dan inklusif, desentralistik vs sentralistik, otoriter versus demokrasi serta dari tengah antara titik ekstrimitas tersebut. Menyangkut dengan siapa yang akan dapat

dinominasikan pada rekrutmen politik dapat dijelaskan berdasarkan inklusifitas tingkat atau eksklusifitas pada setiap pemilih yang bisa menjadi figur andalan partai. Aturan yang pembatasannya hanya ditetapkan oleh negara. Selain itu, dalam model yang eksklusif termuat sejumlah kondisi yang terbatas dalam memiliki hak sebagai pemilih untuk bisa ikut sertakan pada seleksi figur. Parpol dapat memberikan sejumlah kriteria tambahan yang ditentukan oleh bangsa. Negara kerap kali meletakkan aturan dan persyaratan-persyaratan yang mendasar bagi setiap masyarakat untuk bisa menjaga diri sendiri yang diantaranya yaitu persyaratan menjadi warga negara misalnya, umur atau usia, literasi kualifikasi, kediaman tempat bernaung dan jumlah dukungan yang jelas. Penyeleksi model figur disuatu negara memiliki cara-cara yang berbeda, Amerika apalagi, dirujuk sebagai bangsa dengan model yang inklusif karena partai-partai pendukung tersebut disana memposisikan pemilih dan bukan hanya sekedar sebagai anggota partai saja. Model inklusif yang lainnya sebagai bentuk di negara lain, misalnya Asia yang menggunakan model eksklusif ini yaitu sebagai petinggi partai yang berhak menentukan dan menyeleksi figur walaupun gaya rekrutmen politik ini untuk posisi jabatan eksekutif dari partai politik diberbagai negara dengan memakai model yang konsisten.

Sementara itu, dalam bukunya Pamungkas (2012:98), Norris dan Lovenduski membagi agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik berdasarkan dua dimensi, yaitu (1) dimensi bagaimana kekuasaan disebar, yaitu apakah kekuasaan tersentralisasi di pusat, regional atau lokal; dan (2) bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal. Disebut informal apabila tidak ada standar norma yang dibakukan dan terdapat sedikit aturan dan regulasi konstitusional yang mengikat; dan disebut formal apabila terdapat standarisasi prosedur yang dibakukan dan dieksplicitkan dalam proses rekrutmen. Berdasarkan dua dimensi tersebut, terdapat beberapa model dalam proses seleksi antara lain sebagai berikut:

Pertama, informan-terpusat. Tipe ini mekanismenya kemungkinan demokratis konstitusional sebab, dalam praktek proses dikarakteristikan sebagai patronase kepemimpinan. Tanpa tradisi yang mapan dalam demokrasi internal partai, dengan pengorganisasian partai yang longgar, anggota partai memainkan peran yang sangat terbatas dalam proses. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik. Kedua, informal-regional, dimana pimpinan fraksi tawar menawar dengan masing-masing fraksi lainnya dalam rangka mendapatkan figur terbaik diposisi strategis.

Sistem informasi terlokalisasi, sistem ini menjelaskan bahwa penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mampan, kemungkinan dapat berubah-ubah sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil. Kemudian selanjutnya, format terpusat dan format regional, yaitu eksekutif partai pusat dan regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan dan penempatan figur. Formal terlokalisasi, dimana aturan konstitusional dan panduan nasional dimantapkan untuk standar rekrutmen. Dengan sistem ini memungkinkan proses yang terbuka dan aturan yang adil. Sementara dalam merespon sebuah persoalan terkait ketiga hal, yaitu diaman figur yang diseleksi oleh elit partai politik. Hasan menyebutkannya bahwa derajat persoalan desentralisasi, ia secara ringkas menyebutkan bahwa jika figur yang nantinya diseleksi secara kolektif oleh tim seleksi dari elit parpol pada tingkat yang lebih tinggi (nasional) tanpa ada prosedur yang mengukurnya, sejatinya representasi fungsional atau teritorial, ini disebut metode sentralistik. Kontradiksi model dengan sentralisasi yang merupakan desentralisasi metode. Pada desentralisasi metode figur diseleksi secara eksklusif dari tim seleksi partai lokal atau sosial kelompok antara partai dan saksional kelompok.

Desentralisasi teritorial adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan figur partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang sebuah partai, seluruh anggota atau pemilih di sebuah wilayah pemilihan. Desentralisasi fungsional berarti pada saat seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas dan sebagainya. Persoalan yang menjelaskan terkait seleksi figur yang dinominasikan oleh badan pengurus lewat elit partai politik. Rahat dan Hazan mengemukakan ada dua model konfrontatif, antara lain model pemilihan. Dalam sistem pemilihan, penominasian figur adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, seluruh figur diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sedangkan dalam sistem penunjukan, figur

ditentukan tanpa melaksanakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, seorang figur ditunjuk tanpa harus ada persetujuan dari agensi partai atau pemimpin partai.

Dari antara model-model tersebut, model mana yang terbaik. Gagasan tentang partai sebagai agen demokrasi menjadi dasar bahwa model yang melambangkan demokrasi merupakan pilihan terbaik. Meskipun demikian perlu berhati-hati dalam mendefinisikan dalam mendefinisikan demokrasi. Untuk menjawab persoalan tersebut Rahat mengusulkan untuk mempertimbangkan dua persepsi umum terkait dengan demokrasi. Pertama, persepsi positif tentang demokrasi; yakni demokrasi sebagai sebuah sistem yang memungkinkan semua warga berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Dalam pandangan ini juga bahwa sistem demokrasi yang lebih baik yaitu sistem yang secara efektif membandingkan antara beberapa unsur dasar dari demokrasi itu diantaranya, kompetisi, partisipasi, responsifitas dan representasi. Tetapi, dari beberapa unsur tersebut jika bercakupan tidak akan linier dan positif. Dengan hal tersebut sistem demokrasi dalam persepsi lain merupakan sistem yang secara efektif bukan yang ideal membangun partisipasi demokrasi. Kedua, persepsi lain yang mestinya diperhatikan dalam sebuah sistem seleksi dari figur yang demokrasi. Pandangan Rahat terkait demokrasi bahwa mengapa bentuk dari kekuasaan itu potensial terjadinya korupsi, padahal pada konteks kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu mestinya berada pada garda terdepan dengan mensejahterakan rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dari pandangan inilah yang kemudian ketika kekuasaan dari pemilihan figur maka akan mencuat sejumlah aktor-aktor politik yang sudut pandangnya berbeda.

Dari beberapa pandangan diatas yang dikemukakan oleh Rahat soal rekrutmen politik yang demokratis jika memakai metode pemilihan figur dengan tiga tahapan, konsisten akan hal kecil yang dapat memastikan kandidat dengan membuat daftar pendek. Dalam keterwakilan dari terpilih partai dapat menambah atau mengurangi figur dengan memakai prosedur tersendiri ini juga akan mengesahkan kembali kandidat incumbent. Selanjutnya, pengurus dan anggota partai akan menggunakan hak untuk memilih figur dalam penempatan posisi atau jabatan yang strategis.

Multi tahap dari proses tersebut menggabungkan menjadi tiga macam salectorate yang dipakai sistem voting dan penunjukan. Pun, demikian Rahat memberikan sebuah catatan proposal yang dapat peduli akan tradisi dan budaya secara spesifik pada partai tertentu di negara lain. Pada prinsipnya yang perlu ditaati dalam semua masalah dan proses rekrutmen politik yang harus melibatkan selektor melalui multi metode tahapan. Dengan selektor multi tahap tersebut mempunyai kesulitan yang timbul bersamaan dengan candidacy.

Sementara itu, didasarkan pada peran yang mereka mainkan dalam organisasi dan harapan yang mereka inginkan. Terdapat dua bentuk model aktivis partai yang dapat menghasilkan suatu proses pada seleksi figur yang model aktivis dari organisasi partai profesional serta model partai yang amatir. Sebutnya, aktivis partai profesional salah satu dari mereka yang sebagai pekerja dengan loyalitas yang baik, pertama diberikan pada partai sebagai gaya bekerjanya pragmatis. Mereka pun, bagian dari pendukung partai reguler sebagai pendukung partai. Selanjutnya yaitu amatir, mereka ini sangat menentukan dengan isu, dimotivasi dengan inisiatif yang bertujuan sebagai aktivitas partainya hanya dengan melihat salah satu alat yaitu dari anggota partai yang dirancangan.

Dalam pandangan Heshy, bahwa politik partai melalui amatir aktivis akan selalu memiliki perilaku yang jauh berbeda dengan partai yang digabungkan oleh aktivis partai profesional. Aktivis yang amatir identik dengan menggambarkan serta menjadikan partai yang dinamis dengan isu-isu dan prinsip. Bagi mereka isu sebagai salah satu tujuan untuk memenangkan sebuah pertarungan hingga partai yang merupakan tujuan utama untuk mencapai kemenangan. Bagi mereka bahwa partai sebagai alat kekuasaan dalam mencapai sebuah tujuan dan isu merupakan tujuan dari pada partai politik itu sendiri. Mereka ini kurang dapat membuat kompromi dengan posisi mereka untuk memenangkan pemilu. Kedepan model semacam ini akan kelihatan aktif secara dinamis ketika dalam kompetisi lewat peran partisipatif di dalam partai dengan memberikan perhatian pada isu-isu strategis partai sebagai agenda. Hal ini membawa dampak positif bahwasanya ketika mereka diberikan kesempatan untuk memimpin partai maka terjadi perubahan yang kokoh dalam urusan internal partai maupun pada politik sistem.

Salah satu tujuan dari aktivis pragmatis dan profesional bahwa sukses dalam memenangkan pesta demokrasi merupakan sebuah keharusan. Hal ini memposisikan figur sebagai alat dalam mencapai sebuah tujuan, tentu mereka mempercayai suatu kemenangan dalam menangkan pemilihan umum dengan jalan untuk melemparkan isu-isu liar. Dari konteks ini seorang pemimpin partai harus mampu melakukan keseimbangan dari kedua pihak pemerintah maupun aktivis yang hadir dengan orientasi untuk membuang isu strategis.

Dalam klasifikasi lain output kandidat rekrutmen politik yang beda model figur dari rekrutmen eksekutif dan legislatif. Dalam rekrutmen legislatif muncul empat tipe figur diantaranya; partai loyalis, pelayan konstituen (constituent servant), wirausahaan (entrepreneur), dan delegasi kelompok (grup delegate).

B. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Secara teoritik pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi di tanah air. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 56 ayat 1: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Sarundajang (2005), bahwa pemilihan kepala daerah (PILKADA) langsung merupakan salah satu cara menciptakan pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat daerah. Pilkada juga sebagai bagian dari penataan struktur otoriter makro untuk lebih terbukti berfungsinya antara lembaga-lembaga politik mulai dari tingkat pusat sampai pada daerah yang akuntabel, berkualitas, lejitimit, aspiratif dan peka terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Amirudin (2006), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *checks and balances* diantara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, lejitimit, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat. PILKADA adalah upaya demokrasi yang dilakukan untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip yang demokrasi yaitu pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Karena pihak-pihak yang berbeda pendapat itu harus mengembangkan sikap yang toleran, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Harahap (2005), mengemukakan bahwa pemilihan kepala daerah (PILKADA) adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Adapun dalam pandangan Mubarok (2005), ada lima pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Pertama, PILKADA merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, bahkan kepala desa telah dilakukan secara langsung. Kedua, PILKADA merupakan perwujudan konstitusi negara. Ketiga, PILKADA sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. PILKADA menjadi media pembelajaran praktik dalam berdemokrasi bagi rakyat dan diharapkan dapat membekuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya dalam memilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nuraninya. Keempat, PILKADA sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi daerah. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam PILKADA maka komitmen pemimpin lokal atau Kepala Daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lewat pembangunan daerah dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Kelima, PILKADA merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi pemimpin nasional dan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif (Moleong, 2017), dengan fokus penelitian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan PDIP Kota Ternate dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah Kota Ternate pada Pilkada tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui

beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kader partai merupakan cerminan kekuatan Partai, semakin kompak dan solid kader Partai, maka semakin besar kekuatan dan peluang untuk memenangkan pertarungan politik. Mainwaring dan Scully (1995), pelembagaan atau institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Pelembagaan partai merujuk pada kedalaman akar partai dalam Masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideologi/program yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Ideologi dan program partai merupakan salah satu tali pengikat antara pemilih dan partai. Pemilih mengetahui Partai mana yang mempunyai program dan ideologi yang merepresentasikan kepentingan mereka. Ketika terdapat hubungan ideologi dan program yang tidak merepresentasikan kepentingan pemilih, maka pemilih akan cenderung berpindah dari partai satu ke Partai yang lain atau biasa disebut floating voters (Nico Harjanto, 2007).

Pasangan nomor urut 1 Merlisa, SE – Juhdi Taslim, SH.,MH diusung oleh PDIP, PKS, PAN, PBB, Berkarya 9 (Sembilan) kursi dari 30 Kursi di DPRD Kota Ternate, partai pendukung ini sepakat bahwa pasangan ini dapat memenangkan proses pertarungan Pilkada periode 2020-2025 di Kota Ternate karena dilihat dari dukungan anggota dewan partai pengusung. Jika dibandingkan dengan pasangan lainnya yaitu : pasangan nomor urut 2 Dr .M Tauhid Soleman,MSi-Jasri Usman, SAg dan pasangan nomor urut 3 Muhamad Hassan-Jasri Usman yang didukung oleh Partai Golkar, Gerindra dan Hanura dengan jumlah kursi 6 (enam) dan pasangan nomor 4 yaitu Yani Tawari-Abdullah Taher yang didukung oleh Perindo, Demokrat dan PPP yang justru memiliki kursi DPR Kota Ternate berjumlah 8 (delapan) kursi Koalisa. Pasangan Merlisa, SE – Juhdi Taslim, SH.,MH merupakan koalisi yang lahir dari ide atau gagasan perubahan. Dimana partai pendukung menilai figure ini adalah figure yang layak untuk memimpin Kota Ternate semakin baik kedepan. Pasangan Merlisa, SE – Juhdi Taslim, SH.,MH boleh menjadi calon pemimpin yang mampu dan handal karena memiliki track Record dan kemampuan yang terukur.

A. Pola Rekrutmen Politik PDI Perjuangan terhadap Calon Kepala Daerah

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi ini meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam pemerintahan. Untuk itu partai membutuhkan kader-kader yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk dapat mengajukan calon ke bursa kepemimpinan lokal dan nasional.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Kota Ternate, Abdullah Kaunar,SIP.,MA, dalam proses rekrutmen politik memiliki empat tahap; Pertama, tahap simpatisan dimana PDI Perjuangan berusaha untuk menjaring masyarakat sebagai simpatisan partai melalui program sosialisasi dan kebijakan partai yang diambil. Kedua, setelah menjadi simpatisan mereka diajak untuk menjadi anggota partai. Ketiga, para anggota partai diarahkan untuk menjadi aktifis. Para aktifis ini sudah mulai mengisi struktural partai di tingkat daerah. Keempat, tahap kaderisasi dimana para anggota struktural partai diberikan kembali pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan dan loyalitas mereka terhadap ideologi PDI Perjuangan. Mereka harus menanamkan nilai-nilai perjuangan partai seperti kesetiaan kepada Pancasila, setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan nilai-nilai toleransi atau Bhineka Tunggal Ika. Para kader inilah yang kemudian ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Ternate, beliau mengatakan: *“proses kaderisasi dilakukan secara bertingkat. Pertama, kaderisasi di tingkat ranting. Kedua, kaderisasi di tingkat DPC. Kaderisasi dilaksanakan*

secara bertahap bertingkat dan berlanjut. Bertahap artinya dilakukan mulai dari kader pemula sampai kader senior. Bertingkat dibagi dalam kaderisasi pertama, madya, dan senior.”

Berlanjut terus dilanjutkan setiap tahun yang diselenggarakan oleh Anak Ranting, PAC dan DPC, DPD serta DPP. Pola kaderisasi inilah yang menjadi pertimbangan agar para kader dapat mengisi jabatan di pemerintahan. Dari pemaparan tersebut, PDI Perjuangan memiliki pola rekrutmen politik bagi masyarakat untuk bisa mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Pada umumnya, PDI Perjuangan telah menjalankan salah satu fungsi partai politik sebagaimana diterangkan oleh Ramlan Surbakti bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Pola tersebut bertahap dari simpatisan, anggota, aktifis dan kader.

Dalam menentukan kandidat, ada beberapa tahap yang dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat dari partai politiknya untuk mengisi jabatan politik. Setiap partai politik memiliki tahapan yang berbeda-beda tergantung dengan tahapan yang diatur dalam konstitusi partai. Dalam konteks PDI Perjuangan, proses penjaringan ini memiliki dua tipe sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris DPC Kota Ternate sebagai berikut,

“Pada prinsipnya kita merekrut sebanyak-banyaknya, bukan hanya secara kuantitas tapi lebih ke kualitas ada dua tipe dalam penjaringan rekrutmen politik ini. Pertama kita aktif untuk mencari calon-calon ini. Kedua mereka mendaftar sendiri, pola rekrutmen bersifat terbuka.

Penjaringan untuk calon pejabat publik di PDI Perjuangan bersifat terbuka namun dalam proses penjaringan melibatkan daerah. PDI Perjuangan memiliki kebijakan partai bahwa satu tahun sebelum pelaksanaan pemilihan, daerah wajib untuk menjaring bakal calon kepala daerah. proses penjaringannya bisa dari dua arah. Pertama penjaringan internal, yakni penjaringan bakal calon kepala daerah yang berasal dari anggota atau kader PDI Perjuangan. Kedua penjaringan eksternal, yakni penjaringan bakal calon kepala daerah yang berasal dari luar anggota PDI Perjuangan. Biasanya proses penjaringan ini melihat tingkat elaktabilitas seseorang dan kecakapan mereka dalam manajerial. Setelah proses penjaringan, DPC, DPD dan DPP kemudian menyaring kembali bakal calon kepala daerah yang didaftarkan melalui DPC. Itu artinya proses nominasi dalam PDI Perjuangan bersifat desentralistik karena penjaringan dilakukan di tingkat daerah. Namun, proses keputusan diserahkan kembali pada tingkat pusat untuk dianalisa ketokohan, solidaritas partai, dan kesediaan tunduk terhadap kebijakan partai.

Norris mengatakan setidaknya ada tiga tahap yang biasa dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat, yakni Pertama, proses sertifikasi yang berkaitan dengan persyaratan formal baik dari undang-undang pemilu dan konstitusi partai. proses sertifikasi untuk pencalonan kepala daerah melalui PDI Perjuangan adalah harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pilkada. Persyaratan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti syarat yang diatur dalam UU Pilkada. Kedua, proses nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam tubuh partai. Apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi). Proses nominasi calon kepala daerah di PDI Perjuangan sebagaimana diatur dalam peraturan partai nomor 04/2015 tentang mekanisme penjaringan pasangan calon PDI Perjuangan, yaitu :

1. Pendaftaran dibuka oleh struktur mulai pimpinan anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah (DPD).
2. Verifikasi Administrasi tentang bakal calon yang mendaftar.
3. Bakal calon yang lolos verifikasi dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas partai, dan bersedia tunduk terhadap kebijakan partai.
4. Penetapan yang dilakukan oleh DPP
5. Berdasarkan peraturan partai tersebut, pendaftaran dilakukan di tingkat struktur daerah. Kemudian nama-nama yang diajukan tersebut diputuskan ditingkat DPP

Ketiga, proses seleksi yang biasanya dilakukan dengan voting atau penunjukan langsung. Sistem voting dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi dan demokratisasi internal partai agar semua anggota merepresentasikan hak dan pendapatnya. Sedangkan sistem penunjukan langsung identik dilakukan oleh partai politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan partai diambil oleh segelintir elit partai tertentu. Dalam proses seleksi, nama-nama yang sudah terjaring oleh daerah dan dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilaporkan ke DPP. Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas partai, dan kesediannya tunduk terhadap kebijakan partai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris DPD Provinsi Maluku Utara sebagai berikut, *“nama-nama Yang diusulkan daerah kemudian di kirim ke DPP*

untuk dicermati. Apakah nama-nama yang kita ajukan layak dan proper dengan pertimbangan diterima atau ditolak Di DPP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses seleksi tidak dilakukan dengan voting maupun penunjukan langsung. Namun, proses seleksi dilakukan ditingkat DPP dengan melihat berbagai macam pertimbangan. Meskipun tidak sepenuhnya sentralistik, akan tetapi dapat dilihat bahwa proses seleksi kepala daerah di PDI Perjuangan masih diambil oleh segelintir elit partai tertentu yang dalam hal ini ditingkat DPP. Meskipun di tingkat daerah melakukan penjangkaran dan pendaftaran, tapi keputusan terakhir ada ditangan DPP.

B. Pola Rekrutmen yang Dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Ternate

PDI Perjuangan yang memiliki daya tarik yang sangat besar di mata masyarakat membuat proses rekrutmen dapat berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan partai. Terdapat dua metode yang diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen anggota baru yakni inisiatif pribadi dan penawaran yang dilakukan partai terhadap orang atau tokoh masyarakat yang mempunyai potensi besar untuk keuntungan partai. Orang yang datang atas inisiatif dan keinginan sendiri untuk mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan biasanya datang ke kantor PDI Perjuangan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota baru. Selain itu ada pula yang masuk ke PDI Perjuangan dengan diajak oleh kerabat, saudara atau masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya. Untuk memperluas cakupan wilayah yang dikuasai, PDI Perjuangan juga melakukan penawaran untuk beberapa orang/tokoh yang mempunyai potensi atau pengaruh di suatu daerah untuk mau masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Dengan cara ini terbukti efektif, tokoh yang berpengaruh di suatu daerah dengan mudah dapat masuk ke struktural masyarakat, sehingga proses penyebaran ideologi, tujuan, dan kebijakan juga dengan mudah masuk ke masyarakat yang berada di bawah pengaruh tokoh masyarakat tersebut, dengan begitu semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan atau paling tidak walaupun tidak masuk menjadi anggota masyarakat yang sudah mengalami proses indoktrinasi tadi terpengaruh untuk selalu mendukung kebijakan partai. Penerapan model rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di lapangan terbukti mempunyai keunggulan dalam menarik simpatik dari masyarakat. Penanaman ideologi dan perjuangan partai yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kepada seluruh tatanan lapisan masyarakat secara kuat dan mengakar tidak bisa dilepaskan dari keunggulannya dalam membangun jaringan mulai dari struktural terbawah. PDI Perjuangan bisa dengan mudah menarik simpatik masyarakat untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai merupakan buah dari hasil sistem yang diterapkan PDI Perjuangan. Dimulai dari pencarian bibit kader berkualitas di tingkat desa, memberikan penawaran kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, setelah penempatan bagi kader potensial di posisi strategis di dalam kepemimpinan desa.

Sistem ini terbukti efektif karena dari kemampuan kader unggul nantinya akan dengan mudah menarik anggota lainnya di desa tersebut untuk masuk juga ke dalam partai. Tokoh-tokoh masyarakat juga direkrut masuk karena mempunyai keunggulan saat proses masuk dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung partai akan berjalan lebih mudah. Sistem yang dilakukan PDI Perjuangan khususnya Cabang Kota Ternate dalam memperkuat dukungan dan simpatik dari masyarakat memaksimalkan kerja mesin-mesin penggerak partai untuk mencari dukungan sebesar-besarnya dari seluruh lapisan masyarakat. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan.

Fungsi tersebut dapat terlaksana jika partai politik mempunyai kekuatan dukungan yang kuat. Dukungan yang kuat dari anggota, kader, simpatisan maupun masyarakat dalam Pemilu adalah syarat merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan dengan menempatkan kader-kader terbaik PDI Perjuangan di lembaga-lembaga negara. Partai politik berusaha mencari dan mengajak orang yang mempunyai potensi dalam bidang akademik maupun mempunyai potensi dari segi kekuatan dukungan di masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai, hal ini telah dilakukan oleh PDI Perjuangan Dewan Pimpinan Cabang Kota Ternate dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi politik.

C. Rekrutmen Berdasarkan Kaderisasi Partai

Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan partai politik merupakan kelanjutan dari fungsi merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Fungsi tersebut dapat terlaksana jika partai politik mempunyai kekuatan dukungan yang kuat. Dukungan yang kuat dari anggota, kader, simpatisan maupun masyarakat dalam pemilu adalah syarat merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan dengan menempatkan kader-kader terbaik PDI Perjuangan di lembaga-lembaga negara. Mempunyai kemampuan secara pemikiran maupun tindakan yang berkualitas tinggi, selain itu juga mempersiapkan para kader untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas baik bagi partai, bangsa dan negara.

Rekrutmen PDIP terhadap Kader Merlisa, SE sebagai calon kepala daerah karena trend elektabilitasnya semakin hari semakin meningkat. Selain elektabilitas, Merlisa, SE juga memiliki karakter yang terbuka dan diterima masyarakat dengan baik. Hal itu dikarenakan Merlisa, SE merupakan orang yang mudah akrab dan berbaur dengan masyarakat. Dengan keyakinan dan Kekuatan PDIP terus meningkat. Beberapa kali survei mengalami kenaikan, dan massif memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mendongkrak keterpilihannya, terutama dalam meyakinkan swing voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan sebagai calon kepala daerah karena trend elektabilitasnya semakin hari semakin meningkat. Upaya yang dilakukan PDIP dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses kaderisasi adalah dengan memberlakukan sistem penilaian berdasarkan prestasi kader membuat semangat kader untuk ikut sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kader berbagai tingkat dapat maksimal.

Rekrutmen berdasarkan kaderisasi dapat diartikan bahwa setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Almond dan G. Bigham Powell menjelaskan rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri. Integritas dan kompetensi partai politik diperlukan dalam proses menciptakan bangunan politik yang bermartabat (Rusadi Kantaprawira, 1999: 27).

Partai dapat mencetak kader dengan nilai kepemimpinan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama kader partai adalah perpanjangan tangan rakyat dalam menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat lebih berkembang dan mandiri. Arah ini merupakan arah gerakan PDIP yang didalam mengandung nilai-nilai yang ideologi kebangsaan yang kuat dengan tujuan dapat menciptakan masyarakat makmur dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kader partai dituntut memiliki eksistensi dan kompetensi dalam membangun perubahan secara efektif.

Salah satu keberhasilan gerakan PDIP yang dibangun dalam Pilkada Kota Ternate tahun 2020 adalah Silaturahmi kader dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kader Merlisa, SE yang mudah bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat. Kualitas Merlisa, SE memperoleh electoral positif yang menguntungkan bagi PDIP itu sendiri. Karena dengan adanya electoral positif dan proses perjuangan yang militan, maka Merlisa, SE dengan mudah dipasarkan kepada masyarakat, dibandingkan dengan kader yang lain ditubuh PDIP sendiri. mengendalikan Kota Ternate selama lima tahun menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan prestasi yang tergolong cukup bagus. Hal itu dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat, selama menjadi wakil masyarakat. Merlisa, SE mampu menunjukkan keharmonisannya dengan memilih maju berpasangan Judhi Taslim.

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan menggunakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat desa yang tingkat pengetahuannya masih rendah tentang politik. Siapa yang paling sering melakukan pendekatan kepada masyarakat maka dialah yang akan terpilih, dan hal inipun dilakukan oleh PDIP, dan Tim pemenang dalam menarik simpati masyarakat untuk memperoleh dukungan. Komitmen kader dalam meraih hati masyarakat disini adalah cara ampuh yang ditempuh PDIP ke dalam masyarakat agar bisa meraih tujuannya. PDIP memiliki struktur Organisasinya lengkap sampai ke pelosok Desa-desa. Selain itu, yang menjadi pengurus Partai ini di Kota Ternate khususnya ditingkat Desa dan Kecamatan kebanyakan adalah tokoh Masyarakat dan tokoh Agama. Untuk persaingannya kader partai itu sendiri, maka para pengurus partai dari PDIP ini tidak henti-hentinya melakukan pendekatan terhadap masyarakat itu sendiri. Pengurus PDIP ditingkat kecamatan dan desa merupakan tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat, jadi hal ini pula yang merupakan strategi PDIP

yang menempatkan anggota-anggota dalam struktur kepengurusan untuk mendukung Ketua DPC Kota Ternate yaitu Merlisa, SE disung sebagai calon Walikota Kota Ternate Periode 2020-2025.

Partai politik sebagai organisasi massa tentunya tidak lepas dari hakikatnya untuk merebut, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Untuk mendapatkan itu semua partai politik butuh dukungan masa yang banyak dan harus terus meningkat, selain itu untuk meneruskan dan menjalankan roda politik partai, masa sangat dibutuhkan keberadaannya. Kemenangan dalam perebutan, pemertahanan dan penggunaan kekuasaan yang diperoleh bukan berarti tugas partai politik sudah selesai. Kemenangan partai politik dalam Pemilihan Umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Sebagai agen demokrasi.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan (Budi Winarto, 2008:24). Partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. PDIP adalah partai kader yang berideologi Islam dan satu-satunya partai kader murni yang ada di Indonesia. PDIP Kota Ternate menyadari pentingnya rekrutmen dibangun dengan baik. Efektifnya rekrutmen berpengaruh pada kedudukan dan kekuasaan partai politik. Rekrutmen politik merupakan proses penSeleksian untuk menempati peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.

Almond dan Powell (1997), prosedur-prosedur rekrutmen politik terdiri atas prosedur tertutup dan prosedur terbuka. Prosedur tertutup artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kuasa untuk memilih calon pemimpin dan dilaksanakan secara tertutup. Prosedur terbuka artinya masyarakat berhak untuk memilih siapa bakal calon pemimpin serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Proses politik yang dibangun PDIP dalam melakukan koalisi partai dilakukan secara teroganisir dan terlembaga dengan baik (Burhanuddin Muhtadi, 2012:35). Pelembagaan PDIP melahirkan infakstruktur partai tersebar di setiap Kecamatan sampai ditingkat desa. Faktor keberhasilan PDIP adalah Profesionalisme dan militansi kader membuat partai calon partai dapat bersaing dengan elektabilitas yang dimiliki oleh calon. Mainwaring dan Scully (1995), agar Partai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, harus melihat Ideologi dan Program yang jelas terhadap masyarakat. Perolehan kursi PDIP Kota Ternate sangatlah fantastic dibanding tahun-tahun sebelumnya karena Keder partai bergerak dan berjuang untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi sampai ke pelosok desa.

Partai memiliki pola rekrutmen dan kaderisasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran politik yang dianut. Pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan penugasan kader-kader. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai besar di Indonesia yang telah malang-melintang di dunia perpolitikan di Indonesia pastinya memiliki cara dan sistem dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Sebagai partai besar pastinya tujuan untuk terus mampu menjadi partai kepercayaan rakyat kualitas kader sangat dijaga.

D. Model Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Ternate

Kaderisasi merupakan proses pendidikan dan pelatihan bagi anggota partai yang akan dinaikkan jenjang keanggotaannya menjadi seorang kader dengan tujuan membentuk dan menciptakan kader-kader politik mempunyai kemampuan secara pemikiran maupun tindakan yang berkualitas tinggi, selain itu juga mempersiapkan para kader untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas baik bagi partai, bangsa dan negara. Pada dasarnya semakin berkualitas dan kuatnya popularitas seorang kader akan semakin tinggi tingkat dukungan masyarakat terhadap partai yang manaungi kader tersebut. Setelah melaksanakan penerimaan anggota baru, lalu anggota diterjunkan ke masyarakat untuk dilihat kemampuan

dan potensinya dengan diberi nilai dalam setiap kegiatan yang diikutinya. Setelah proses penilaian dan mendapat anggota-anggota yang potensial, selanjutnya anggota diberi pendidikan khusus kader secara berjenjang. Untuk dapat menjadi peserta pendidikan dan pelatihan kader, anggota harus benar-benar memiliki penilaian yang bagus serta pengabdian terhadap partai yang besar.

Model Kaderisasi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan KotaTernate dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu model kaderisasi dengan sistem kelas (pendidikan dan pelatihan kader) dan juga model kaderisasi dengan sistem gerakan. Model kaderisasi kelas merupakan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian materi kepada para anggota PDI Perjuangan. Jenjang dalam pelatihan dan pendidikan kader yang dilakukan PDI Perjuangan dibagi berdasarkan wilayah struktural partai yaitu Pratama ditingkat Cabang, Madya untuk tingkat Provinsi, dan Utama ditingkat Nasional.

Disetiap jenjang mempunyai perbedaan dari materi dan pelatihannya. Sistematika, metode, jadwal serta materi dalam pelaksanaan kaderisasi disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai yang dibentuk oleh DPP berdasarkan hasil keputusan kongres I PDI Perjuangan. Dilihat dari pelaksanaan dan prosedur yang digunakan dalam pendidikan kader dibagi menjadi tiga jenjang dengan pemberian pengetahuan tentang ideologi partai serta materi wawasan kebangsaan harus ditempuh dan dikuasai oleh masing-masing kader di setiap jenjangnya. Metode yang digunakan dalam proses pelatihan kader ini merupakan penggabungan dari tiga aspek sekaligus, yakni kelas (proses pendidikan dan proses belajar mengajar tentang materi pengkaderan), struktur (program yang dilakukan partai untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dimasyarakat), dan basis (tempat bagi kader untuk menjalankan roda organisasi dan pengimplementasian program partai). Keunggulan dari diterapkannya metode yang digunakan oleh PDI Perjuangan yakni materi-materi yang diberikan dalam pendidikan dapat secara nyata diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penyebaran ideologi dapat dilakukan oleh setiap kader saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Materi yang diberikan dalam pendidikan dan pelatihan kader dibagi menjadi tiga tingkatan yakni kuliah awal, kuliah tengah, dan kuliah akhir. Kuliah awal penuh berisi materi-materi pengkaderan yang diberikan didalam kelas (ruangan). Semua materi diberikan kepada para kader oleh pemateri yang mempunyai kemampuan mumpuni dibidang materi tersebut. Kuliah tengah merupakan tahap kedua setelah para kader menyelesaikan kuliah tengah.

Sistem kuliah tengah dilakukan secara kondisional tergantung dari finansial dari kekuatan finansial dari DPP. Paska kuliah tengah akan diadakan kuliah akhir yang berada dibawah pengawasan DPP dengan dilakukan secara online karena jangkauan yang luas diseluruh wilayah Indonesia. Model kaderisasi dengan sistem Gerakan merupakan kaderisasi lebih terfokus pada kinerja kader di lapangan dalam menjalankan program partai. Model kaderisasi PDI Perjuangan dengan sistem gerakan dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan kader memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, pembentukan organisasi sayap, pembentukan jaringan.

Pengkaderan dengan melihat kemampuan kader memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat merupakan kaderisasi yang tidak mempunyai pakem yang pasti. Partai menerapkan sistem ini dengan menyebar para anggota dan kader ke masyarakat guna melatih mereka untuk dapat peka terhadap kehidupan bermasyarakat. Para kader dan anggota yang dikembalikan ke masyarakat tadi ditugaskan untuk mengabdikan dan mendekatkan diri ke masyarakat guna melihat dinamika, isu-isu, keinginan dan harapan dari masyarakat terhadap pemerintah khususnya yang berada pada lingkup kekuasaan PDI Perjuangan.

Kinerja para kader maupun anggota di masyarakat akan terus dipantau oleh partai dengan diberikan penilaian. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang membentuk organisasi sayap guna menunjang mesin partai. Pembentukan organisasi-organisasi sayap yang berada dibawah naungan PDI Perjuangan bertujuan sebagai sarana organisasi penopang sekaligus dapat dijadikan lumbung suara bagi PDI Perjuangan. Gerakan organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan lebih mengarah pada kreatifitas dari para kader.

Organisasi sayap ini berdiri secara mandiri namun tetap dalam pengawasan dari PDI Perjuangan. Pembentukan organisasi sayap ini juga tidak menyalahi dari aturan dan ketentuan dengan pelaksanaan pengkaderan tentang pembentukan jaringan, karena ditinjau dari kemampuan kader yang digunakan dalam proses pengikatan pemikiran masyarakat yang

beragam menuju pemikiran yang sepeham dengan partai. Pembentukan jaringan ini merupakan sistem pengkaderan secara alami dari hasil interaksi dan kerja di masyarakat. Mengakar kuatnya PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari keunggulannya dalam membangun jaringan mulai dari struktur terbawah.

PDI Perjuangan bisa dengan mudah menarik simpatik masyarakat untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai merupakan buah dari hasil sistem yang diterapkan PDI Perjuangan. Dimulai dari pencarian bibit kader berkualitas ditingkat desa, penempatan bagi kader potensial di posisi strategis di dalam kepemimpinan desa. Proses pencarian dan penarikan minat masyarakat tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya kemampuan kader yang mumpuni dalam komunikasi yang masyarakat secara baik. Pembentukan jaringan jika ditinjau dari ketentuandan aturan dengan pelaksanaan pengkaderan tentang pembentukan jaringan atau sistem PDI Perjuangan Kota Ternate dalam prakteknya sudah sesuai dan tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Hal ini bisa ditinjau dari kemampuan kader yang digunakan dalam proses pengikatan pemikiran masyarakat yang beragam menuju pemikiran yang sepeham dengan partai. Tanpa adanya kemampuan dari kader dalam proses pengikatan masyarakat menuju pembentukan jaringan akan sulit dapat terwujud. Dengan pembentukan jaringan di masyarakat ini kader akan mengalami proses pengkaderan secara alami dari hasil interaksi dan kerja di masyarakat. Kemampuan dari kader akan semakin meningkat mana kala pengalaman yang di dapat dari kader semakin banyak.

E. Kendala yang Dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Proses Rekrutmen dan Kaderisasi

Terdapat kendala-kendala yang sering kali menghambat kinerja partai dalam melakukan rekrutmen anggota baru. Interaksi langsung dengan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan mudah, pemahaman dan daya tangkap masyarakat yang beragam membuat proses diskusi dan pertukaran pikiran kader dengan calon anggota baru kadang sulit mencapai titik temu antar kedua belah pihak sesuai yang diinginkan. Kemampuan daya tangkap masyarakat yang beragam inilah yang membuat PDI Perjuangan mengalami kesulitan dalam menyebarkan ideologi partai. Pola pikir masyarakat hanya terfokus pada kesejahteraan, mencari makan dengan mudah, sekolah murah, dan mudah mencari nafkah.

Kesulitan dalam merealisasikan keinginan masyarakat ke dalam program partai secara real membuat kader yang turun ke lapangan menjadi sulit untuk benar-benar masuk dan bisa meyakinkan masyarakat untuk masuk dan mendukung partai. Prakteknya di lapangan untuk menarik simpati masyarakat agar mau masuk dan mendukung partai perlu sosialisasi salah satunya dengan diskusi sederhana. Praktek yang tidak mudah dilakukan karena banyak pemahaman masyarakat yang kurang mampu untuk menangkap wawasan kekinian tentang kondisi Bangsa saat ini. Selain itu, Kemampuan komunikasi kader yang berbeda-beda berdampak pada hasil yang berbeda-beda pula. Kemampuan pemahaman terhadap ideologi, tujuan dan program partai yang seharusnya menjadi senjata utama kader dalam proses menarik simpatik dari masyarakat sering tidak dikuasai penuh oleh kader-kader yang bisa dikatakan "lemah" dalam bidang akademis.

Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Ternate untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen salah satunya dengan menugaskan kader-kader unggulan di tiap daerah untuk dijadikan motor utama penggerak di masyarakat. PDI Perjuangan mendahulukan tindakan nyata dalam proses pendekatan ke masyarakat dengan membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk menarik minat masyarakat ikut serta dalam sebuah kegiatan, baru setelah itu dilakukan proses interaksi lewat komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tahu terlebih dahulu bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang pro rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Upaya pengatasaan kendala dalam proses rekrutmen tersebut dapat dilihat bahwa selain komunikasi secara langsung dengan masyarakat ternyata program pro rakyat lebih menarik simpati dari masyarakat. Fakta di lapangan masyarakat saat ini sulit jika hanya dengan kata-kata, pemikiran, atau sesuatu yang belum jelas penggambarannya, tetapi masyarakat lebih mudah jika melihat satu kebijakan yang benar-benar berguna bagi masyarakat. Contohnya seperti pemberian bantuan material bangunan yang tersebar di seluruh Kota Ternate. PDI Perjuangan mencoba

menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat kebijakan yang memiliki nilai manfaat untuk rakyat yang pada akhirnya nanti juga akan berpengaruh pada citra partai sendiri.

Model pengkaderan yang dilakukan oleh partai tidak selalu mulus dan lancar terlaksana, di dalam DPC PDI Perjuangan yang melakukan Pendidikan kader terdapat beberapa kendala yang di hadapi. Proses kaderisasi yang berjenjang dan bertingkat serta materi yang padat kadang menimbulkan kebosanan yang dirasakan oleh peserta kaderisasi yang imbasnya akan muncul keengganan kader untuk ikut dalam pendidikan kader. Selain itu kesibukan para kader di luarkegiatan partai juga terkadang menghambat proses pelaksanaan kegiatan pendidikan kader. Hal ini coba diatasi oleh partai dengan menekankan kepada para kader bahwa pendidikan kader merupakan kegiatan wajib dan penting untuk para kader yang telah dipilih menjadi delegasi untuk mewakili ranting, cabang, maupun daerah untuk mengikuti kegiatan pendidikan kader. Digunakan juga sistem penilaian berdasarkan prestasi kader, hal ini membuat semangat kader untuk ikut sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kader di berbagai tingkat dapat maksimal. Cara ini terbukti efektif dengan munculnya kompetisi di antara parakader dalam membuktikan prestasi dan kinerjanya di partai agar terpilih menjadi delegasi ranting, cabang, atau daerah sebagai delegasi peserta pendidikan dan pelatihan kader. Di tingkat Cabang dalam proses kaderisasi kader Pratama terdapat dua aspek permasalahan yaitu dari tingkat pemahaman peserta yang beragam dan juga keterbatasan pemateri mumpuni di cabang yang membuat DPC harus meminta bantuan struktural di atasnya (DPD, DPP) untuk mengirimkan pemateri yang mumpuni agar kedua aspek permasalahan di kegiatan pendidikan dan pelatihan kader dapat teratasi.

F. Basis Argumentasi DPC PDI Perjuangan Kota Ternate Mengusung Kandidat Pada Pilkada Tahun 2020

PDI Perjuangan sebagai Partai Pemenang pada Pemilihan Umum 2019 baik Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif secara Nasional, PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang nantinya sangat diharapkan memiliki peran besar dalam berbagai pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu momentum politik elektoral di tingkat lokal, PDI Perjuangan sekiranya perlu menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk dapat berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020.

Kota Ternate merupakan salah satu dari sekian banyak daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. DPC PDI Perjuangan Kota Ternate tentunya tidak mau kehilangan momentum untuk dapat memenangkan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Ternate 2020. Salah satu langkah strategis sudah disiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Ternate jauh hari sebelum tahapan Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan. Hal yang dimaksud yakni dengan menyiapkan kader terbaiknya sebagai Bakal Calon Walikota yang akan turut ambil bagian tentunya dengan mengikuti berbagai mekanisme penjangkaran yang dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan.

Melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan dan berbagai kajian internal DPC PDI Perjuangan Kota Ternate, salah satu kader terbaik yang akan didorong sebagai bakal calon Walikota dari internal adalah Ibu Merlisa yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ternate. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban secara kelembagaan partai bahwa secara internal PDI Perjuangan memiliki kader yang siap untuk berkontestasi pada ajang pemilihan Wali Kota Ternate tahun 2020. Di sisi lain disadari bahwa segala mekanisme rekrutmen dan seleksi Bakal Calon kepala Daerah telah diatur melalui Pedoman Organisasi Parpol yang telah ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan dan sampai saat ini telah dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Ternate.

Adapun berbagai basis argumentasi yang menjadi dasar DPC PDI Perjuangan Kota Ternate untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPP PDI Perjuangan sehingga Ibu Merlisa (Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ternate) dapat direkomendasikan sebagai Bakal Calon Wali Kota Ternate pada Pemilihan Walikota Ternate tahun 2020, sebagai berikut:

- 1) Ibu Merlisa merupakan kader PDI Perjuangan yang proses penjenjangan kader dimulai dari tingkat bawah (ranting, PAC kemudian DPC), sehingga dianggap memiliki komitmen, memahami karakter serta nilai-nilai perjuangan partai.
- 2) Ibu Merlisa merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ternate selama 3 Periode.

- 3) Di bawah kepemimpinan Ibu Merlisa, DPC PDI Perjuangan memiliki struktur kelembagaan partai yang solid baik DPC sampai pada tingkatan ranting.
- 4) Dalam menjalankan amanah sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan belum pernah ada gejolak konflik internal yang terjadi.
- 5) Memiliki kemampuan manajemen organisasi parpol sehingga sampai saat ini DPC PDI Perjuangan dapat menunjukkan soliditasnya dalam setiap momentum politik di tingkat lokal.
- 6) Kemampuan leadership yang dimilikinya menjadikan modal politik dalam mengerahkan khususnya kekuatan mesin politik partai dari DPC hingga tingkatan ranting, para simpatisan serta masyarakat Kota Ternate pada umumnya.
- 7) Ibu Merlisa mendapat dukungan dari seluruh pengurus dari tingkatan DPC sampai pada tingkatan anak ranting.
- 8) Terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate pada pemilihan legislatif tahun 2009.
- 9) Kepemimpinan Ibu Merlisa sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan mengantarkan PDI Perjuangan sebagai peroleh suara terbanyak pada pemilihan legislatif tahun 2014.
- 10) Pada periode 2014-2019 Ibu Merlisa berhasil menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Ternate
- 11) Secara politis, Ibu Merlisa dapat dikatakan memiliki basis riil yang terus terjaga. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali Ibu Merlisa pada pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada bulan April 2019.
- 12) Ibu Merlisa tercatat sebagai salah satu politisi perempuan yang sukses dalam kiprah atau karir politiknya dengan kembali mendapat kepercayaan rakyat sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif dalam 3 (tiga) periode berturut-turut. Prestasi yang jarang diraih oleh politisi-politisi di Kota Ternate.
- 13) Di lihat dari representasi etnik, Ibu Merlisa berlatar belakang etnik Makayoa (Makian-Kayoa). Salah satu etnis terbesar dan solid dalam kontestasi politik lokal.
- 14) Keberhasilan Merlisa dalam pemilihan legislatif dapat dikatakan dilalui di tengah sebuah ruang kontestasi yang dianggap cukup berat. Di mana Merlisa mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan melalui wilayah yang masih memiliki keterikatan kuat dengan basis masyarakat adat Ternate (Etnis Ternate). Namun tantangan tersebut dapat dilalui dengan modalitas sosial yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini menjadikan dasar pertimbangan bahwa Ibu Merlisa juga merepresentasikan basis wilayah adat (Etnis Ternate).
- 15) Selama memimpin DPRD Ibu Merlisa Memiliki hubungan, komunikasi yang baik dan dukungan oleh beberapa pimpinan Partai politik mapupun SKPD di Kota Ternate sebagai sebuah kekuatan untuk menggalang dukungan politisi dan birokrasi.
- 16) Memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan partai politik lainnya sebagai syarat dalam proses pencalonan kepala daerah.
- 17) Mendapat dukungan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat di tingkat lokal.
- 18) Memperoleh dukungan dari berbagai kalangan/kaum millenial untuk mencalonkan diri sebagai Calon Walikota tahun 2020

Selain itu dilihat dari hasil survei internal partai Ibu Merlisa selalu berada ditingkat peringkat atas. Sesuai hasil wawancara yang disampaikan Ketua Bapilu DPC PDIP, "*Dari hasil survey internal partai, Ibu Merlisa peroleh dukungan 75% hal ini juga yang membuat kami lebih meyakinkan untuk mengusung Ibu Merlisa sebagai Calon Walikota*".

Jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak di Kota Ternate menjadikan suatu peluang dari Ibu Merlisa untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pemilih perempuan. Hal ini dikarenakan Ibu Merlisa berpotensi merupakan satu-satunya perempuan yang akan bertarung pada kontestasi politik lokal tahun 2020 di Kota Ternate.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Penyaringan, Penjaringan, dan Penetapan, ternyata partai menetapkan Merlisa itu sebagai calon figur Walikota Ternate dikarenakan, Ibu Merlisa, SE, memiliki track record dan kemampuan yang sudah terukur sebab Ibu Merlisa memulai karir sebagai kader PDI Perjuangan mengikuti proses penjenjangan kader

dimulai dari tingkat bawah yaitu mulai dari ranting, PAC kemudian DPC, sehingga dianggap memiliki komitmen, memahami karakter serta nilai-nilai perjuangan partai, kemudian selain itu Ibu Merlisa juga merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ternate selama 3 periode. Di bawah kepemimpinan Ibu Merlisa, DPC PDI Perjuangan memiliki struktur kelembagaan yang solid baik DPC sampai tingkat ranting, dan dalam menjalankan amanah sebagai ketua DPC PDI Perjuangan belum pernah ada gejolak konflik internal yang terjadi sebab Ibu Merlisa memiliki kemampuan manajemen organisasi parpol. Terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate pada pemilihan legislatif tahun 2009, kemudian tahun 2014 Ibu Merlisa juga terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kota Ternate dengan perolehan suara terbanyak, sehingga membuat dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Ternate. Dan pada tahun 2019 kembali terpilih lagi sehingga membuat Ibu Merlisa tercatat sebagai salah satu politisi perempuan yang sukses dalam kiprah atau karir politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudi, dan A. Z. Bisri. 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalan Pilkada 2005*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. DKI Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI.
- Harahap, A. H. 2005. *Manajemen & Resolusi Konflik Pilkada*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta : PT Gramedia.
- Lay, Cornelis. 2010. *Melawan Negara PDI (1993-1986)*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mubarok, M. M. 2005. *Sukses Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Jakarta: PT Java Pustaka Media Utama.
- Pangmungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pangmungkas, Sigit. 2009. *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Bali: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pito, A. T., Efriza., dan Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Jakarta: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Rauf, M. A. A. 2016. *Pengertian Rekrutmen Politik*. (<https://majasari13.blogspot.com>, diakses 6 November 2021)
- Rush, Michael., dan Althoff Phillip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Sarundajang, S.H. 2005. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Skripsi Yerik Agama (2015), Strategi Pemenangan PDIP.
- Suyanto, B., dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Zaman, K. R. 2016. *Perjalan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Publikasi.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Tesis 2010, Donar Taluke, Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Langsung.